

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Basri, Syrafil. 2015. *Teori Pengeluaran Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.

Bastian, Indra. 2002. *Audit Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat. Hal. 82

Erry, Achmad. 2005. *9 Kunci Sukses Tim Sukses Dalam Pilkada Langsung*. Jakarta: Galang Press

Ghozali, Imam., 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM. SPSS 19*. Edisi Kelima. Semarang: Universitas Diponegoro.

Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat. Hal. 141.

Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.

Halim, Abdul. 2009. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000
Tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga Menteri
Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah

Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Nazir, Mohammad. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
- Peraturan Pemerintahan Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.
- Prasetyono, Dwi Sunar. 2012. *Buku Pintar Pajak*. Yogyakarta: Laksana.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Santoso, Singgih. 2012. *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Hal 293
- Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Cetakan Ketiga. Bandung: Mandar Maju.
- Siregar B. dan B. Siregar. 2001. *Akuntansi Pemerintahan dengan Sistem Dana*. Edisi Ketiga. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Hal. 395
- Sugiyono. 2012. *Metodelogi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metodelogi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono., 2014. *Metodelogi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metodelogi Penelitian & Pengembangan: R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metodelogi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

Jurnal:

Abdullah, Syukriy. 2014. Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Universitas Syiah Kuala*

Akbar, Taufik. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Universitas Pasundan*.

Ardhani, Pungky, 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah). *Jurnal Universitas Diponegoro*. Hal 17

Kasyati. 2015. Pengaruh DAU, DAK PAD, Pertumbuhan Ekonomi, DBH, Dan Kemandirian Fiskal Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah). *Jurnal FE Universitas Negeri Semarang*.

Kustiawan. Memen. 2005. Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah Melalui Peningkatan Kualitas Aparatur pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi*. Vol.2 No.1.

Mahargono, Imaniar Putri. 2017. Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan SILPA terhadap Alokasi Belanja Modal di Jawa Timur. *STIE Perbanas Surabaya*.

Mutiah, Ratna Mappanyuki. 2015. The Effect of Surplus Budget Financing, Special Allocation Fund, General Allocation Fund, Regional Revenue, and Characteristics of Local Government on Decision of Capital Expenditure (Survey in Local Government in Indonesia). *Research Journal of Finance and Accounting*. Hal. 14-16.

Nuarisa, Sheila Ardhian. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengelolaan Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Semarang*. Hal. 1-2.

Novalia, Nanda Dwi. 2016. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi

Lampung. *Jurnal Universitas Lampung*.

Susilawati. 2013. Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Study & Accounting Research* Vol.XI No.1.

Prakosa, Kesit Bambang. 2004. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY). *JAAI*. Volume 8 No.2, Desember 2004.

Putriani, Sri. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah di Indonesia Periode 1999-2009. *Jurnal Universitas Hasanuddin*.

Sulistyowati, Diah. 2011. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal. *Jurnal Universitas Diponegoro*.

Yovita, Farah Marta. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se-Indonesia Periode 2008 – 2010). *Jurnal FE Universtitas Diponegoro*.

Wandira, Arbie Gugus. 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*. ISSN Hal. 2252-6765.

Website:

Abdullah, Syukriy. 2014. Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal. https://www.researchgate.net/profile/Syukriy_Abdullah4/publication/303961479_PENGARUH_SISA_ANGGARAN_PENDAPATAN_SENDIRI_DAN_DANA_PERIMBANGAN_TERHADAP_BELANJA_MODAL/links/576046bc08ae227f4a3f2366/PENGARUH-SISA-ANGGARAN-PENDAPATAN-SENDIRI-DAN-DANA-PERIMBANGAN-TERHADAP-BELANJA-MODAL.pdf

Admin. 2017. 5 Kota dan Kabupaten di Jaa Barat Siap Terima Dana Alokasi Khusus (DAK). <https://tampang.com/detail/5-kota-dan-kabupaten-di-jawa-barat-siap-terima-dana-alokasi-khusus--dak--5163.php>

Heryawan, Ahmad. 2017. Belanja Modal Daerah. Administrator Muda. <http://administratormuda96.blogspot.co.id/2016/09/belanja-modal->

[daerah.html](#) fenomena belanja modal

Karniwa, Iwa. 2016. Belanja Modal Daerah. Administrator Muda. <http://administratormuda96.blogspot.co.id/2016/09/belanja-modal-daerah.html>

Khoer, Miftahul. 2017. DAU Bakal Dikurangi, Jawa Barat Siap-Siap Berhemat. Kabar24 Bisnis. <http://kabar24.bisnis.com/read/20170729/78/676080/dau-bakal-dikurangi-jawa-barat-siap-siap-berhemat>

Pamungkas, Wisnu Wage. 2017. Pendapatan Asli Daerah Jabar Rp5 Triliun. Financial. <http://kabar24.bisnis.com/read/20170518/78/654968/pendapatan-asli-daerah-jabar-rp5-triliun/> fenomena pad

Solihin, Dadang. 2011. Reformulasi Desentralisasi Fiskal dalam Instrumen DAU, DAK dan DBH. <http://www.slideshare.net/DadangSolihin/reformulasidesentralisasi-fiskal-dalam-instrumen-dau-dak-dan-dbh/>